

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI DESA SAUKIBE KEC.AMFOANG BARAT LAUT

Frengki Leonardo Nupu¹, Lasarus Jehamat², Lenny Sofia Bire Manoe³
frengkinupu133@gmail.com¹, lasarus.jehamat@staf.undana.ac.id²,
lenny.s.bire.manoe@staf.undana.ac.id³
Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial di Desa Saukibe dan mengidentifikasi implikasi sosiologis yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis mengacu pada teori efektivitas Richard M. Steers (1977) yang menilai pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum berjalan efektif karena rendahnya pemahaman masyarakat, kurangnya koordinasi dengan pendamping, serta terbatasnya kemampuan warga dalam mengikuti mekanisme program. Secara sosiologis, bantuan sosial memberikan dampak positif berupa peningkatan kondisi ekonomi dan akses layanan dasar, namun juga memunculkan potensi ketergantungan serta perubahan dinamika sosial jika pelaksanaannya tidak berjalan secara tepat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penguatan pendampingan, serta evaluasi pendataan untuk meningkatkan efektivitas program.

Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Sosial, Implikasi Sosiologis, Desa Saukibe.

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of the social assistance program in Saukibe Village and to identify its sociological implications. The research employs a qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis refers to Richard M. Steers' (1977) effectiveness theory, which includes goal attainment, integration, and adaptation. The findings indicate that the program has not yet been fully effective due to limited community understanding, insufficient coordination with program facilitators, and the community's low capacity to comply with program mechanisms. Sociologically, the program provides positive impacts such as improving the economic condition of vulnerable families and increasing access to basic services. However, it also carries the potential to create dependency and influence social dynamics if not implemented properly. The study recommends enhancing socialization efforts, strengthening facilitation, and improving data evaluation processes to support better program implementation.

Keywords: Effectiveness, Social Assistance, Sociological Implications, Saukibe Village.

PENDAHULUAN

Pemenuhan kesejahteraan masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pembangunan. Hal ini disebabkan karena kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan fenomena kemiskinan sekaligus berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari tugas dan kewenangannya. Kesejahteraan merupakan harapan setiap individu, yaitu kondisi kehidupan yang baik dan makmur, di mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesejahteraan berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, hukum, dan aspek lainnya (Mulyadi, 2016).

Dalam upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah saat ini menjalankan berbagai program secara terpadu. Program-program tersebut meliputi pemberian bantuan sosial,

pemberdayaan masyarakat, serta dukungan terhadap pengembangan usaha kecil. Berbagai upaya ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mulyadi, 2018).

Status masyarakat yang tergolong miskin dapat diidentifikasi melalui tingkat pendapatan yang tidak mampu memenuhi standar hidup dasar, seperti kecukupan gizi, layanan kesehatan, pendidikan, serta perumahan atau permukiman yang layak. Untuk mempermudah interpretasi mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat, perubahan kesejahteraan dapat dilihat melalui delapan indikator utama, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta indikator sosial lainnya yang menjadi acuan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat (BPS, 2023). Seluruh indikator tersebut digunakan sebagai alat ukur untuk menilai tingkat kesejahteraan suatu komunitas atau kelompok masyarakat di suatu wilayah. Pada masa kini, kemiskinan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai ketidakmampuan dari segi pendapatan, tetapi juga mencakup ketidakberdayaan dalam aspek sosial dan politik serta ketimpangan pendapatan antarwilayah maupun antarkomunitas.

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Permasalahan ini merupakan isu sosial yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia (Id, 2023). Kemiskinan juga menjadi persoalan sosial dan kemanusiaan yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini seringkali ditandai dengan rendahnya pendapatan, keterbatasan keterampilan, kondisi kesehatan yang kurang baik, keterbatasan kepemilikan aset ekonomi, serta rendahnya akses terhadap informasi. Selain itu, rendahnya kualitas hidup masyarakat juga menjadi indikator adanya permasalahan kemiskinan di suatu wilayah atau daerah.

Pada awalnya, program bantuan sosial (bansos) dirancang untuk mengatasi dampak krisis ekonomi, kerawanan pangan, terbatasnya kesempatan kerja, minimnya fasilitas sosial di bidang kesehatan dan pendidikan, serta penurunan kondisi ekonomi masyarakat. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat dengan tujuan melindungi masyarakat dari risiko sosial, sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan mereka.

Bantuan sosial yang sering disebut sebagai bansos merupakan program pemerintah yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan ketentuan umum Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan kepada perseorangan, keluarga, maupun kelompok masyarakat yang bersifat tidak berkelanjutan dan selektif, dengan tujuan mencegah terjadinya potensi risiko sosial (Lidysari et al., 2022). Dengan demikian, diperlukan pengelolaan sumber daya yang efektif agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam pelaksanaan program bantuan sosial, transparansi dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data menjadi hal yang sangat penting guna menjamin efektivitas program tersebut dalam mengatasi kemiskinan. Syifa Annisa Azzahra, Desy Safitri, dan Sujarwo (2024) menyatakan bahwa salah satu indikator penting dalam upaya pengurangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini ditujukan kepada keluarga berpenghasilan rendah agar memperoleh bantuan secara berkelanjutan yang dapat meringankan beban ekonomi serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan sosial lainnya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),

dan Program Indonesia Pintar (PIP). Program-program tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat kurang mampu, sekaligus memberikan kesempatan bagi penerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau bahkan mengembangkan usaha kecil. Bantuan sosial yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan sosial dalam rangka mengurangi kerentanan ekonomi keluarga miskin (Salsabila et al., 2024).

Desa Saukibe merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Kupang dengan jumlah penduduk sebanyak 2.335 kepala keluarga (KK). Sebagian besar penduduk desa ini tergolong dalam kategori miskin dengan persentase mencapai 60,17%. Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat kurang mampu di desa tersebut, di antaranya melalui program PKH dan BLT. Berdasarkan data pemerintah desa, jumlah masyarakat yang tergolong kurang mampu dan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial sebanyak 193 KK.

Klasifikasi penerima bantuan sosial di Desa Saukibe dibedakan berdasarkan jenis bantuan dan wilayah dusun. Penerima bantuan PKH terdiri dari Dusun I sebanyak 32 KK, Dusun II sebanyak 25 KK, Dusun III tidak ada penerima, Dusun IV sebanyak 43 KK, dan Dusun V sebanyak 30 KK. Sementara itu, penerima bantuan BLT terdiri dari Dusun I sebanyak 18 KK, Dusun II sebanyak 12 KK, Dusun III tidak ada penerima, Dusun IV sebanyak 18 KK, dan Dusun V sebanyak 15 KK. Di sisi lain, terdapat 1.098 KK yang tercatat tidak menerima bantuan sosial. Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dan hambatan terkait pelaksanaan program bantuan sosial tersebut, seperti apakah bantuan sosial yang diberikan telah tepat sasaran serta sejauh mana bantuan tersebut mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini menjadi perhatian penting, khususnya bagi masyarakat Desa Saukibe yang terdiri dari lima dusun dan sebagian besar penduduknya masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam efektivitas program bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan di Desa Saukibe, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati dalam kondisi alamiah. Menurut Moleong (2017:6), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah. Hendryadi et al. (2019:218) juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial secara alami.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Saukibe, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu wilayah penerima program bantuan sosial pemerintah sehingga relevan untuk mengkaji efektivitas program tersebut dalam mengurangi kemiskinan masyarakat. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti individu yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang masyarakat Desa Saukibe yang berprofesi sebagai petani dan memiliki pengalaman sebagai penerima bantuan sosial.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam

dengan informan penelitian (Hasan, 2002:82). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah desa, literatur ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Hasan, 2002). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi masyarakat dan pelaksanaan program bantuan sosial di lokasi penelitian (Nawawi, 1991; Asyari, 1983). Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap program bantuan sosial (Arikunto, 1993). Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan dokumen, arsip, dan catatan yang berkaitan dengan penelitian (Samsu, 2017:99).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Basrowi & Suwandi, 2008:209). Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk deskripsi naratif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan Nyata Program Bantuan Sosial di Desa Saukibe

Pelaksanaan program bantuan sosial di Desa Saukibe menunjukkan perubahan yang cukup nyata bagi keluarga penerima manfaat. Dalam periode 2023–2025, penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berlangsung relatif konsisten. BLT Dana Desa umumnya diterima setiap bulan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan PKH disalurkan beberapa kali dalam setahun dan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pendidikan serta kesehatan. Pada tahun 2023 bantuan sosial berperan dalam pemulihan ekonomi keluarga, tahun 2024 menunjukkan kondisi yang lebih stabil, dan pada tahun 2025 bantuan masih menjadi penopang utama kesejahteraan rumah tangga miskin meskipun masih ditemukan kendala dalam pemerataan dan ketepatan sasaran.

Secara umum, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi keluarga, pola hidup masyarakat, serta akses terhadap layanan dasar. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa bantuan sosial mampu mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga miskin serta meningkatkan pemanfaatan layanan pendidikan dan kesehatan di Desa Saukibe.

B. Perbaikan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pengurangan Beban Ekonomi

Salah satu dampak paling nyata dari program bantuan sosial adalah meningkatnya kemampuan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bantuan PKH dan BLT membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama untuk kebutuhan pangan, pendidikan anak, dan kesehatan.

Hal ini disampaikan oleh Joel Kuanine (40, petani) dalam wawancara pada 26 November 2025 pukul 15.00 WITA:

“Kalau tidak ada PKH dan BLT itu, kami memang susah sekali. Penghasilan dari kebun tidak selalu cukup... Uang bantuan kami pakai untuk beli beras, minyak, dan kebutuhan anak sekolah. Dengan bantuan itu, beban di rumah jadi lebih ringan.”

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Yumina Baimnune (51, petani) pada 28 November 2025 pukul 16.00 WITA:

“Bantuan ini memang sangat menolong. Saya biasanya pakai untuk beli kebutuhan makan dan berobat kalau anak sakit. Tanpa bantuan, kami kadang bingung mau ambil dari

mana.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Lores Manit (69, petani) pada 26 November 2025 pukul 15.00 WITA:

“BLT yang kami terima sangat membantu sekali... bantuan itu yang kami pakai buat beli sembako dan kebutuhan rumah. Jadi pengeluaran di rumah tidak seberat dulu.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar informan menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian lahan kering yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Ketika hasil panen menurun, bantuan sosial menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Untuk memastikan validitas data, informasi dari informan dibandingkan dengan keterangan aparat desa serta hasil observasi dan dokumentasi penerima bantuan.

Jika dilihat melalui Teori Efektivitas Richard M. Steers (1977), suatu program dinilai efektif apabila mampu mencapai tujuan yang ditetapkan, memberikan manfaat nyata, serta menghasilkan perubahan positif bagi penerima. Dalam konteks ini, bantuan sosial di Desa Saukibe dapat dikatakan cukup efektif karena mampu mengurangi tekanan ekonomi keluarga dan membantu mereka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

C. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Program PKH juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Keluarga penerima bantuan menjadi lebih aktif membawa anak ke posyandu serta memastikan anak tetap bersekolah.

Hal ini diungkapkan oleh Merkiur Bopsuni (43, petani) pada 27 November 2025 pukul 16.00 WITA:

“Sejak ada PKH ini, saya jadi lebih rajin bawa anak ke posyandu... Anak sekolah juga saya perhatikan betul supaya tidak bolos.”

Pendapat serupa disampaikan oleh Ripka Sola (49, petani) pada 29 November 2025 pukul 17.00 WITA:

“Dulu kami ke posyandu kalau anak sakit saja. Tapi setelah dapat PKH, kami jadi rutin timbang badan anak dan tahu soal gizi.”

Sementara itu Panehas Nupu (62, petani) menyatakan pada 4 Desember 2025 pukul 10.00 WITA:

“Sekarang tiap pagi saya bangun anak supaya pergi sekolah... ikut posyandu juga bagus karena kami tahu berat badan anak dan dapat vitamin.”

Temuan ini menunjukkan bahwa PKH tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan. Dalam perspektif Steers (1977), perubahan perilaku tersebut menjadi indikator efektivitas program karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

D. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Perubahan lain terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan program bantuan sosial. Masyarakat mulai lebih aktif mengikuti musyawarah desa, memberikan data secara jujur saat pendataan, serta melaporkan jika terdapat ketidaktepatan dalam daftar penerima.

Hal ini disampaikan oleh Nahor Manit (46, petani) pada 27 November 2025 pukul 13.00 WITA:

“Sekarang kalau ada urusan bantuan kami sudah tahu harus bagaimana... kami ikut pendataan dan kasih keterangan yang benar.”

Pendapat serupa disampaikan oleh Alek Faot (43, petani) pada 4 Desember 2025 pukul 14.00 WITA:

“Kalau ada pengecekan daftar penerima kami datang ke kantor desa. Kalau ada nama yang tidak sesuai kami berani bilang supaya diperbaiki.”

Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Berdasarkan Teori Efektivitas Richard M. Steers (1977), keterlibatan masyarakat dalam program merupakan indikator bahwa program tersebut berjalan secara efektif karena mampu mendorong perubahan perilaku dan kesadaran kolektif.

E. Faktor yang Mempengaruhi Program Bantuan Sosial di Desa Saukibe

1. Ketepatan Pendataan Penerima Bantuan

Ketepatan pendataan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Di Desa Saukibe masih ditemukan ketidaksesuaian data, seperti warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdaftar, atau sebaliknya warga yang sudah mampu masih tercatat sebagai penerima.

Hal ini diungkapkan oleh Daniel Kuanine (50, petani) pada 27 November 2025 pukul 13.00 WITA:

“Kadang data dari desa tidak sama dengan keadaan di kampung... ada yang sebenarnya susah sekali tapi tidak dapat bantuan.”

Pendapat serupa disampaikan oleh Alek Faot (43, petani) pada 4 Desember 2025 pukul 10.00 WITA:

“Waktu pendataan ada warga yang tidak di rumah jadi tidak masuk daftar, tapi ada juga yang sebenarnya sudah tidak layak masih terima bantuan.”

Menurut Richard M. Steers (1977), kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena tujuan utama penyaluran bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan belum tercapai secara maksimal.

2. Peran Pendamping Sosial

Pendamping PKH memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program. Pendamping bertugas memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban peserta serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa.

Hal ini disampaikan oleh Nahor Manit (46, petani) pada 27 November 2025 pukul 17.00 WITA:

“Pendamping PKH sering datang menjelaskan hak dan kewajiban kami... kalau tidak paham mereka sabar menjelaskan.”

Menurut Joel Kuanine (40, petani) pada 26 November 2025 pukul 10.30 WITA:

“Kalau pendamping aktif, warga lebih disiplin dan program berjalan lancar.”

Dalam perspektif Steers (1977), keaktifan pendamping menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas program karena berperan memastikan informasi dan aturan program dipahami oleh masyarakat.

3. Tingkat Pemahaman Masyarakat

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan aturan program juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaannya.

Hal ini diungkapkan oleh Ripka Sola (49, petani) pada 29 November 2025 pukul 17.00 WITA:

“Kadang ada warga yang belum terlalu paham soal aturan program, jadi mereka sering terlambat ikut pertemuan.”

Pendapat serupa disampaikan oleh Merkiur Bopsuni (43, petani) pada 27 November 2025 pukul 16.00 WITA:

“Masih banyak yang hanya tahu mereka menerima bantuan, tapi tidak tahu kewajiban mereka.”

Berdasarkan Teori Efektivitas Richard M. Steers (1977), rendahnya pemahaman masyarakat menunjukkan bahwa aspek integrasi dan adaptasi program belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pendampingan agar

masyarakat dapat memahami serta menjalankan kewajiban program secara lebih baik.

F. Implikasi Penelitian

Secara umum, hasil penelitian ini memiliki implikasi teoritis, praktis, dan sosiologis. Secara teoritis, temuan ini mendukung pandangan Richard M. Steers (1977) bahwa efektivitas program dapat dilihat dari tercapainya tujuan dan manfaat nyata bagi penerima. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa untuk meningkatkan akurasi pendataan, transparansi pelaksanaan program, serta mengaitkan bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi.

Secara sosiologis, bantuan sosial tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga memengaruhi pola perilaku, nilai, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Pelaksanaan program yang transparan dan tepat sasaran dapat memperkuat solidaritas sosial, sedangkan ketidaktepatan sasaran berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial di Desa Saukibe belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aturan, kewajiban, serta prosedur program, sehingga pencapaian tujuan belum maksimal. Keterbatasan koordinasi antara pendamping dan peserta, serta kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan mekanisme program, turut menjadi kendala utama. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi, dukungan pendampingan, dan keterlibatan aktif warga.

Di samping itu, program bantuan sosial memberikan sejumlah dampak sosial bagi masyarakat. Bantuan tersebut membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga rentan dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar, tetapi juga berpotensi menciptakan ketergantungan dan mempengaruhi pola hubungan sosial apabila pelaksanaannya dianggap tidak adil. Oleh karena itu, perbaikan dalam proses pendataan, sosialisasi, dan pengawasan pelaksanaan program penting dilakukan agar bantuan dapat dirasakan secara merata serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi II)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyari. (1983). *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Budiman, A. (1996). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia.
- Bulkin, F. (1991). *Kemiskinan dalam Studi Politik Indonesia: Transformasi Seri III*. Jakarta.
- Effendi, T. N. (1993). *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly Jr., J. H. (1996). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses (Edisi 8, Terjemahan)*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hadi, S. (1987). *Metodologi Research (Jilid II)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nawawi, H. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Jurnal

- Aisyah, S. (2014). Relasi kekuasaan kepala desa Bandar Klippa dan Bupati Deli Serdang. *Repository UMA*. <https://repositori.uma.ac.id>
- Claudia Pantow., Kaawoan, J., & Kumayas, N. (2019). Efektivitas pemekaran kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi*, 3(3).
- Haliim, W. (2020). Problematika kebijakan dana hibah dan bantuan sosial sumber APBD: Relasi

- korupsi terhadap kekuasaan kepemimpinan dan perilaku elit. *Inovasi*, 17.
- Lidysari, W., Tambunan, H. S., & Qurniawan, H. (2022). Penerapan data mining dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial pemko dengan algoritma C4.5 (Kasus Kantor Kelurahan Martoba). *Kesatria: Jurnal Penerapan Sistem Informasi (Komputer dan Manajemen)*, 3(1), 53–61. <https://doi.org/10.30645/kesatria.v3i1.97>
- Mulyadi, M. (2016). Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat. *Jurnal Kajian*, 21(3), 221–236.
- Mulyadi, M. (2018). Strategi pemerintah dalam penanganan kemiskinan dan kesenjangan. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, X(9), 13–18.
- Rosalina, I. (2012). Efektivitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan pada kelompok pinjaman bergulir di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1).
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial (bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>

Internet / Website

- Akram Pandu. (2024). Teori efektivitas: Definisi, faktor, dan aspek pemicunya. *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indikator kesejahteraan rakyat. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Cantika Adinda Putri. (2023). Bukti di RI yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com>
- Dinas Sosial Buleleng. (2018). Kemiskinan. <https://dinsos.bulelengkab.go.id>
- Redaksi KPPN. (2020). Program bantuan sosial dan akuntabilitasnya. Kementerian Keuangan RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id>